

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdullah Marlang, Rina Masyana, 2011, *Hukum Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya*, Aspublishing Makassar, Mitra Wacana Media, Makassar

Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

-----, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.

Acmad Santosa, et. al., 2020, *Analisis UU Cipta Kerja Sektor Kelautan Dan Perikanan*, Edisi 7, Indonesia Ocean Justice Initiative, Jakarta Pusat.

Asep Burhanudin, 2015, *Bahan Kajian Dirjen PSDKP dalam Pelatihan Fisheries Crime Investigation*, JCLEC, Semarang.

Adami Chazawi, 2010, *Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Pelajaran Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, jakarta.

Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Charles, A.T., 2001, *Sustainable Fishery Systems*, Blackwell Science, Oxford.

Djoko Tribawono, 2013, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Dendy Mahabrur dan Jejen Jenhar Hidayat, 2018, *Analisis Kerugian Ekonomi Akibat Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna*, Prosiding Seminar Nasional Kelutan Dan Perikanan IV, Surabaya.

François Ost, 2002, *Legal System Between Order and Disorder, (Translated By Iain Stewart)*, Clarendon Press Oxford, Oxford.

- H.A.S Natabaya, 1994, *Laporan Penelitian Tentang Aspek-Aspek Hukum Pengelolaan Perikanan di Perairan Nasional ZEEI*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hans Kelsen, 1979, *Allgemeine Der Normen*, Manz, Wien.
- , 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.
- Ilhami Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Jaap C. Hage., 1997, *Reasoning With Rules: An Essay On Legal Reasoning And Its Underlying Logic*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
- Jerzy Stelmach dan Bartosz Brożek, 2008, *Methods Of Legal Reasoning*, Springer, Dordrecht.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 2002, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Koentjaraningrat, 1987, *Sejarah Teori Antropologi*, Penerbit UI Press, Jakarta.
- Kartodihardjo, H., 2017, *Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Diskursus-Politik-Aktor-Jaringan*, Sajogyo Institute, Bogor.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Russel Soge Foundation, New York.
- Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Marcus Priyo Gunarto, 2008, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 2011, *Kriminalisasi dan Penalisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mulyadi, S, 2005, *Ekonomi Kelautan*, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Mulyati Pawennei & Rahmuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Mustafa Abdullah dan Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2015, *Illegal Fishing*, Cet. ke-1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Roberts, C. M., et al., 2005, *The Role Of Marine Reserves In Achieving Sustainable Fisheries Phil*, R. Soc. B, Trans.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Globalisasi Dan Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Sayidiman Suryohadiprojo, 2013, *Keamanan Laut dan Tanggung Jawab Indonesia: Tantangan dan Kendala*, Makalah TNI-A, yang disampaikan pada Lokakarya Hukum Laut Internasional, Yogyakarta.

- Scandol, J. P., *et al.*, 2005, *Ecosystem-Based Fisheries Management: An Austilian Perspекtive*. Aquat, Living Resour.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers , Jakarta.
- , 1985, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- , 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Remadja Karya, Jakarta.
- , 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindi Persada , Jakarta.
- Suman, A., Wudianto., Sumiono, B., Badrudin dan Nugroho, D, 2014, *Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumber daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI)*. Ref Graphika dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Sonny Koeshendrajana, I Wayan Rusastra, Purwito Martosubroto, 2019, *Potensi Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan WPPNRI 731*, Jakarta, hlm. 3.
- Tim BPHN, 2017, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan*, BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta.
- Anonim, 2003, "*Illegal Fishing in the Southern Ocean: The Problem, Practices and Perpetrators*" Australian Antarctic Magazine 5 Winter, Australia.
- Anonim, 2015, *Analisis Data Pokok Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015*, Pusat Data Statistik dan Informasi KKP RI, Jakarta.
- Yuli Winiari Wahyuningtyas, 2016, *Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya.

Tesis:

Agung Tri Radityo, 2017, "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing*", Tesis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Muladi Dalam Dwi Endah Nurhayati, Tesis: "Sistem Pidana Denda Dalam Kebijakan Legislatif Di Indonesia", Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro (2009)

Fauzan Irgi Hasibuan, 2019, "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Kerja Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai*", Tesis, Universitas Sumatera Utara Medan.

Disertasi:

Maimuna Renhoran, *strategi penanganan illegal fishing, unreported and unregulated (IUU) fishing di laut arafuru*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2012.

Agung Tri Radityo, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2017.

Yuli Winiari Wahyuningtyas, *Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Berdasarkan Peraturan PerUndang-undangan*, Surabaya, Universitas Airlangga, 2016.

Hartati HI. Arsyad, "*Peluang Dan Tantangan Kerjasama Indonesia-Filipina Dalam Menangani Illegal Fishing*", Skripsi., Universitas Hasanuddin, 2015.

Jurnal:

Acmad Santosa, *Analisis Undang-undang Cipta Kerja Sektor Kelautan Dan Perikanan*, Edisi 7, 11 Oktober 2020.

Alvi Syahri Dalam Lidya Suryani Widayati, "Ultimum Remedium Dalam Bidang Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 1, Vol. 22, (2015).

Ingram, H. dan Schneider, A., 1990, "Improving Implementation Through Framing Smarter Statutes". *Journal of Public Policy*, January, Cambridge University, London.

- M. Amin Hanafi, 2015, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing Pada Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Indonesia", *Jurnal Hukum Ransendental*, Vol.1. No 3, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Maluku, Indonesia.
- Michael G. Faure Dan Katarina Svatikova, "Criminal Or Administrative Law To Protect The Environment? Evidence From Western Europe", *Journal Of Environmental Law*, Vol. 24:2 (2012).
- Pratiwi Ayu Sri Daulat, "Urgensi Penggunaan Sanksi Hukum Pidana Dalam Konteks Penanggulangan Kejahatan," *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 16, No. 1 (2018): 79-86, Doi: [Http://Dx.Doi.Org/10.36356/Hdm.V16i1](http://dx.doi.org/10.36356/Hdm.V16i1).
- Radityo Pramoda dan Tenny Apriliani, 2019, Kajian Hukum Kebijakan Ukuran Kapal Dalam Defenisi Nelayan Kecil, *Jurnal Kebijakan Sosek-KP*, Vol. 9, No. 2, Desember.
- Salman Luthan, "Ad Criteria Of Criminalization," *Jurnal Ius Quia Iustum* 16, No. 1 (2009).
- Simanjuntak, M., "Hubungan Faktor Lingkungan Kimia, Fisika Terhadap Distribusi Plankton Di Perairan Belitung Timur, Bangka Belitung". *Journal of Fisheries Sciences*, 11 (1).
- Simela Victor Muhammad, 2016, "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan", *Political*, Vol. 3, No. 1, Jurnal DPR RI.
- Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, Anak Agung Dian Onita, "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4, (2015)

Artikel:

- Atho Mudzhar, "*Konstruksi Fatwa dalam Islam*", Peradilan Agama, Edisi 7 Oktober 2015.
- Ndrzej Malec, 2001, "*Legal Reasoning & Logic*", *Studies in Logic Grammar & Rhetoric*, Vol. 4, No. 17.

Sherief Maronie, 2020, "*Peranan PPNS Perikanan Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan*", kkp.go.id.

Peraturan Perundang-undangan:

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Kelautan dan Perikanan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas UURI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republikl.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 31 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Adminitrasi

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Kep/53/X/2002 Tentang Organisasi Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/Kepmen-Kp/2016 Tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, Dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor 995/Kpts/IK 210/9/99 Tentang Potensi Sumber Daya Ikan dan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan

Keputusan Gubernur Ssulawesi Selatan Nomor .1313/VII/2019 Tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/Kepmen-Kp/2017 Tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan.

Internat:

Anonim, IPOA-IUU Pendekatan, Diakses Pada Januari 1, 2022, dari <https://www.fao.org/fishery/en/ipoa-iuu/about>

CNN Indonesia, 17 November 2016, diperoleh dari, "<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161117201518-20-173409/pantura-over-fishing-kkp-akan-pindahkan-nelayan-ke-area-baru>", diakses 4 April 2022.

Diperoleh dari <https://www.fao.org/fishery/en/ipoa-iuu/about>, diakses pada (1/1/2022).

Diperoleh dari <https://media.neliti.com/media/publications/35677-ID-tinjauan-tentang-penegakan-hukum-tindak-pidana-penangkapan-ikan-secara-illegal-i.pdf>, diakses pada (3/4/2022).

Diperoleh dari <https://www.medcom.id/nasional/daerah/nN94JD3K-8-pelaku-illegal-fishing-di-sulsel-ditangkap>, diakses pada (27/4/2022).

Diperoleh dari <https://adoc.tips/download/peranan-ppns-perikanan-dalam-penanganan-tindak-pidana-perika.html>, diakses pada (13/7/2022).

Diperoleh dari <https://doi.org/10.1017/S0143814X00004682>, diunduh pada (12/4/2022).

Diperoleh dari <http://one-geo-blogspot.com/2010/01/potensi-kelautan-indonesia.html> , diakses pada (3/4/2022).

Diperoleh dari <https://fajar.co.id/2020/11/01/sulsel-zona-merah-destructive-fishing-kementerian-kelautan-dan-perikanan-ke-tangaya/>, diakses pada (27/4/2022).

Diperoleh dari <https://tajuk.co.id/2020/11/04/kasus-illegal-fishing-terbesar-ada-di-perairan-pangkep-kkp-sasar-nelayan/>", diakses pada (27/4/2022).

Diperoleh dari <https://dprexternal3.dpr.go.id>, diakses pada (3/4/2022).

- Diperoleh dari <https://doi.org/10.1017/>, diunduh pada (12/4/2022).
- Diperoleh dari <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/43037-kkp-revisi-aturan-pengenaan-sanksi-administratif>, diakses pada (13/7/2022).
- Diperoleh dari <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv>, diakses pada (2/3/2022).
- Direktorat Jendral Perikanan Tangkap (DJPT), 2015, *Statistik Perikanan Tangkap Indonesia*, Direktorat Jendral Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia.
- lin Sitti Djunaidah, "Tingkat Konsumsi Ikan Di Indonesia Ironi Di Negeri Bahari". Penyuluhan Perikanan dan Kelautan, Vol 11 Nomor 1 April 2017.
- Kompas, 6 November 2009, diperoleh dari <http://one-geoblogspot.com/2010/01/potensi-kelautan-indonesia.html>, diakses 3 April 2022.
- M. Amin Hanafi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing Pada Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Indonesia*, Jurnal Hukum Ransendental Vol.1. No 3. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Maluku, Indonesia, diperoleh dari <https://media.neliti.com/media/publications/35677-ID-tinjauan-tentang-penegakan-hukum-tindak-pidana-penangkapan-ikan-secara-illegal-i.pdf>. Diakses 3 April 2022.
- Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Upaya Megungkap Ruang Gerak *Illegal Fishing* di Indonesia, 03 Juli 2019.
- Roberts, C. M., P. J. Hawkins dan F. R. Gell. 2005. *The role of marine reserves in achieving sustainable fiseheries* *Phil. Trans. R. Soc. B*.
- Scandol, J. P., M. G. Holloway, P. J. Gibbs dan K.L Astles. 2005. *Ecosystem-Based Fisheries Management*. An Austilian Perspsektive. Aquat. Living Resour.
- Simanjuntak, M, 2009. *Hubungan faktor lingkungan kimia, fisika terhadap distribusi plankton di perairan Belitung Timur*, Bangka Belitung. Journal of Fisheries Sciences.
- Simela Victor Muhammad, 2011, *Illegal Fishing Di Perairan Indonesia Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di*

Kawasan, Political Vol. 3, No. 1. Jurnal DPR RI, Jakarta, Indonesia diperoleh dari <https://dprexternal3.dpr.go.id>, diakses 3 April 2022.

Wati P. Ria. 2014. Dampak Kelebihan Tangkap (Overfishing) Terhadap Pendapatan Nelayan di Kabupaten Rokan Hilir. Jurnal JOM.Fekon Vol.1. No. 2. Faculty of Economic Riau University, Pekanbaru, Indonesia diperoleh dari <https://media.neliti.com/media/publications/33697-ID-dampak-kelebihan-tangkap-overfishing-terhadap-pendapatan-nelayan-di-kabupaten-ro.pdf>, diakses 3 April 2022.

Wiji Nurhayat, 2015, "*Menteri Susi : Kerugian Akibat Illegal Fishing Rp 240 Triliun*", dalam Detik Finance Online 1 desember 2014, diperoleh dari www.detikfinance.com, diakses 22 september 2022.

LAMPIRAN

**KOMANDO ARMADA II
PANGKALAN UTAMA TNI AL VI**



**SURAT IZIN
Nomor SI/ 37 /VII/2022**

- Dasar** : 1. Surat Asintel Danlantamal VI Nomor R/81-SKSC/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Surat Keterangan Security Clearance.
2. Surat Dekan Bidang Akademik Riset dan Inovasi Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Nomor 4584/UN4.5.1/PT.01.04/2022 tanggal 10 Juni 2022 tentang permohonan izin penelitian.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka izin melaksanakan penelitian bahan tesis.
- DIIZINKAN**
- Kepada** : Muhammad Fauzi Ramadhan Stambuk B012202020 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. ✓
- Untuk** : 1. Diizinkan untuk melaksanakan penelitian bahan tesis dengan judul Penegakan Hukum Penyidik dalam Tindak Pidana Illegal Fishing di wilayah Perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan TMT 25 Juli 2022.
2. Bertanggung jawab atas setiap kegiatan kepada Asops Danlantamal VI.
3. Melaksanakan izin ini dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Selesai.**

Dikeluarkan di Makassar
pada tanggal 22 Juli 2022

a.n. Komandan Pangkalan Utama TNI AL VI
Wakil Komandan
mewakili,

Iswantono, S.Si., M.M.
Kolonel Laut (P) NRP 12868/P

Tembusan :

1. Komandan Lantamal VI
2. Para Asisten Danlantamal VI
3. Dansatrol Lantamal VI
4. Kadisminpers Lantamal VI
5. Kadiskum Lantamal VI
6. Dantim Intel Lantamal VI
7. Dandenma Lantamal VI
8. Dekan Fakultas Hukum Unhas



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
CABANG DINAS KELAUTAN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

E_mail : cdk.pangkep85@gmail.com Jln. Poros Makassar Pare-pare Km. 85, Kota Pos 90126 Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 001 / SKP / DPA-SKPD / TU-CDK-PPK / VII /DKP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Abdul Kadir, S.Pi,M.Si**
Nip : 19671231 199903 1 031
Jabatan : Kepala CDK Pangkep

Dengan ini menerangkan bahwa nama yang tersebut di bawah ini :

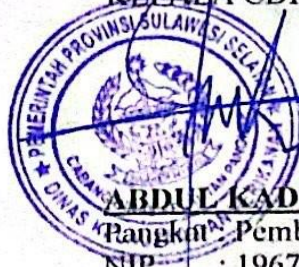
Nama : **Muhammad Fauzi Ramadhan**
Nomor Pokok : B012202020
Universitas : Universitas Hasanuddin Makassar
Program Studi : Hukum / Srata-2
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar

Berdasarkan surat izin penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 2429/S01/PTSP/2022 perihal Izin Penelitian tertanggal 20 Juni 2022, bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian dan pengambilan data di Cabang Dinas Kelautan Pangkajene dan Kepulauan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. guna penyusunan tesis yang berjudul " PENEKAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : Pangkep
PADA TANGGAL : 04 Juli 2022

KEPALA CDK PANGKEP



ABDUL KADIR, S.Pi, M.Si

Pangkep Pembina

NIP : 19671231 199903 1 031



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN

Jl. Sultan Hasanuddin No. 43 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 90611
Telp/Fax : (0410)21040 - (0410)21041, www.kejari-pangkep.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET-05/P.4.27/Cp.1/07/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Gurindro, S.T., S.H., M.H.
Pangkat/golongan : Jaksa Madya (IV/a)
NIP. : 19730903 199303 1 002
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri

dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muhammad Fauzi Ramadhan
NPM : B012202020
Program Kekhususan : Hukum/Strata-2
Fakultas : Hukum

Telah melaksanakan penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan untuk memperoleh data dalam penyusunan Tesis yang berjudul : "***Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan***".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Pangkajene, 06 Juli 2022
Kepala Kejaksaan Negeri
Pangkajene Kepulauan



FAJAR GURINDO, S.T., S.H., M.H
Jaksa Madya, NIP.19730903 199303 1 002

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
5. Arsip.





SURAT KETERANGAN

Nomor : SK / 20 / VII / 2022 / Dit Polairud

1. Yang bertanda tangan di bawah ini, Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sulsel menerangkan bahwa :
 - a. Nama : MUHAMMAD FAUZI RAMADHAN
 - b. Nomor Pokok : B012202020
 - c. Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM (S2)
 - d. Fakultas : HUKUM
2. Bahwa benar yang bersangkutan tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Sulsel, dengan judul penelitian : ***"Penegakan Hukum Penyidik Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan"***.
3. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

Makassar, 12 Juli 2022

a.n. DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA
POLDA SULAWESI SELATAN
u.b.
KASUBDIT GAKKUM



[Signature]
ANWAR DANU, S.E., M.H.
AKBP NRP 69120517



PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE

Jl. Sultan Hasanuddin No. 38, Pangkajene Kepulauan 90611

Telp. (0410) 21221-21224 Fax. 21224

Website : <https://www.pn-pangkajene.go.id/> Email : pn.pangkajene@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W22.U14/ 270 /VI/2022/PN. Pangkajene

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SADAR SUANNA, S.H.**
NIP : 19661230 199303 1 005
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene

Dengan ini menerangkan bahwa nama yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Muhammad Fauzi Ramadhan**
Nomor Pokok : B012202020
Universitas : Universitas Hasanuddin Makassar
Program Studi : Hukum / Strata-2
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar

Berdasarkan surat izin penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 2429/S.01/PTSP/2022 perihal Izin Penelitian tertanggal 20 Juni 2022, bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian dan pengambilan data di Pengadilan Negeri Pangkajene guna penyusunan tesis yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN"**.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 29 Juni 2022
PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE

panitera

SADAR SUANNA, S.H.
NIP. 19661230 199303 1 005